

Katalog: 4301002.52

ISSN: 2797-1147

STATISTIK

pendidikan

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Katalog: 4301002.52

ISSN: 2797-1147

STATISTIK

pendidikan

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023

Volume 7, 2024

<https://ntb.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2023

ISSN : 2797-1147

No. Publikasi : 52000.24014

Katalog BPS : 4301002.52

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 72 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan Oleh:

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Penyusun

Pengarah:

Drs. Wahyudin, MM.

Koordinator Teknis:

M. Ikhsany Rusyda, SST., M.Si.

Naskah:

M Faiq Syafiqi Awwali Manshur, S.Tr.Stat.

Ayu Rosita Sari, SST.

Pengolah Data:

Rika Verlita, SST.

Desain Tata Letak:

Ayu Rosita Sari, SST.

Gambar Kulit:

Ayu Rosita Sari, SST.

Penyunting:

Isna Zuriatina, SST., M.T.

Gusti Ketut Indradewi, SST., M.Sc.

Rika Verlita, SST.

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan. Untuk membangun sistem pendidikan yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait berbagai aspek pendidikan termasuk partisipasi sekolah, tingkat literasi, kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas dan sebagainya. Capaian pembangunan pendidikan tahun 2023 dapat dipotret dari indikator yang tersaji dalam Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan data sekunder dari Dinas Pendidikan.

Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan rekomendasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Mataram, Mei 2024

Kepala BPS Provinsi NTB,



WAHYUDIN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan merupakan hak semua warga negara seperti tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah selalu mengupayakan pembangunan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, tanpa melihat umur, gender, kemampuan ekonomi, keterbatasan fisik, dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencanangkan Program Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk di dalamnya Pendidikan Anak Usia dini dan Wajib Belajar.

Pada tahun 2023, capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) di NTB untuk anak usia 3-6 tahun sebesar 43,77 persen. APK PAUD anak perempuan (43,95 persen) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (43,58 persen). Berdasarkan klasifikasi desa, APK PAUD perkotaan (43,92 persen) lebih rendah dibandingkan perdesaan (43,62 persen). Namun capaian ini masih jauh dari target RPJMD Provinsi NTB tahun 2023 sebesar 83,22 persen.

Partisipasi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Nilai APK cenderung mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD/ sederajat (107,07) melebihi 100 persen. Artinya selain anak usia 7-12 tahun, terdapat anak usia kurang dari 7 tahun dan/atau lebih dari 12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Nilai APK SMP 93,32 dan APK SMA 93,23. Angka partisipasi untuk SMP dan SMA berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Partisipasi sekolah menengah juga berbeda menurut tingkat ekonomi keluarga.

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan. Jumlah sekolah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jenjang pendidikan dengan pertumbuhan sekolah tertinggi adalah SMK yaitu sebesar 4,66

persen. Meskipun jumlah sekolah swasta lebih banyak dibanding sekolah negeri pada jenjang SMA dan SMK, jumlah peserta didik pada sekolah negeri masih mendominasi. Terdapat kesenjangan jumlah peserta didik yang cukup besar antara SMK negeri dan swasta yaitu 69,78 persen dan 30,32 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) untuk penduduk 15 tahun ke atas sebesar 89,11 persen. Kesenjangan AMH terlihat pada penduduk usia 15-59 tahun dan 15 tahun ke atas, dimana AMH yang lebih rendah adalah untuk penduduk perempuan, tinggal di daerah perdesaan, dan berasal dari rumah tangga dengan status ekonomi terbawah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2023 di NTB mencapai 8,39 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SMP (kelas VIII) atau putus sekolah di kelas 3 SMP (Kelas IX). RLS cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Sistematika Penyajian.....	4
METODOLOGI.....	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Metode Pengumpulan Data	9
2.3. Metode Analisis	9
2.4. Konsep dan Definisi	10
KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT	17
3.1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)	20
3.2. Partisipasi Sekolah.....	25
3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	27
3.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)	29
3.3. Jumlah Sekolah, Peserta Didik, dan Guru	31
3.3.1. Jumlah Sekolah	31
3.3.2. Jumlah Peserta Didik.....	33

3.3.3. Jumlah Guru.....	34
CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	36
4.1. Angka Melek Huruf (AMH)	38
4.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	42
4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	43
LAMPIRAN	46

<https://ntb.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 . Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2023 RPJMD dan Capaian Tahun 2023 Provinsi NTB.....	20
Tabel 3.2 . Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, 2023	25
Tabel 3.3 . Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, 2023	27
Tabel 3.4 . Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi NTB, 2023	30
Tabel 3.5 . Jumlah Sekolah di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	32
Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Peserta Didik di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, dan Status Sekolah Tahun Ajaran 2022/2023	34
Tabel 3.7 . Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023	35
Tabel 4.1 . Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi NTB, 2023.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa Provinsi NTB, 2023	21
Gambar 3.2	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi NTB, 2023	22
Gambar 3.3	APK Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, 2023	23
Gambar 3.4	APM Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, 2023.....	23
Gambar 3.5	Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi NTB, 2023.....	24
Gambar 3.6	Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, 2023.....	27
Gambar 3.7	Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023.....	33
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, 2023	41
Gambar 4.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (dalam Tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Provinsi NTB, 2018-2023	43
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB, 2023	44

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023.....	48
Tabel 2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023	49
Tabel 3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023.....	50
Tabel 4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023	51
Tabel 5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023	52
Tabel 6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023	53
Tabel 7.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	54
Tabel 8.	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023	55
Tabel 9.	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, 2023	56
Tabel 10.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023	57
Tabel 11.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023	58
Tabel 12.	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023	59
Tabel 13.	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	60
Tabel 14.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	61
Tabel 15.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023	62
Tabel 16.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2023	63

Tabel 17.	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023	64
Tabel 18.	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023	65
Tabel 19.	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023	66
Tabel 20	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023	67
Tabel 21.	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota, 2023 ...	68
Tabel 22.	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menurut Kabupaten/Kota, 2023	69
Tabel 23.	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas menurut Kabupaten/Kota, 2023	70
Tabel 24.	<i>Sampling Error</i> Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2023	71



PENDAHULUAN



<https://ntb.dps.go.id>



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Tujuan keempat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di Indonesia, pembangunan pendidikan dipercaya sebagai bagian dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Muara pembangunan pendidikan tercermin dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menunjang kehidupan manusia karena dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Isu pendidikan seperti pendidikan tidak merata, diskriminasi gender dalam pendidikan, pendidikan berkualitas itu “mahal” menjadi perhatian masyarakat global sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang berisikan tujuan: (1) memperluas pendidikan usia dini, (2) menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan wajib (Wajib Belajar), (3) meningkatkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), (4) meningkatkan angka melek huruf, (5) menghapus kesenjangan gender, dan (6) meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui pengembangan akses terhadap pendidikan anak usia dini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi dan perbaikan kurikulum serta peningkatan kualitas, serta kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas, masyarakat mempunyai daya saing dan kompetensi yang baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kualitas hidup dapat lebih baik dari generasi sebelumnya.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Partisipasi pendidikan prasekolah/PAUD. Data disajikan menurut jenis kelamin, klasifikasi desa, dan keadaan ekonomi rumah tangga. Penyajian data ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

1.2. Tujuan

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun untuk menggambarkan keadaan dan perkembangan sektor pendidikan di Provinsi NTB. Gambaran yang menyeluruh dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah dan capaian pembangunan pendidikan. Informasi dari indikator-indikator pendidikan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pada program dan kebijakan pada sektor pendidikan khususnya di Provinsi NTB. Selain itu, data dan informasi yang ada dapat dijadikan bahan kajian penelitian di Provinsi NTB.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini tersusun dalam empat bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab II membahas tentang sumber

data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta konsep dan defifnisi yang dipakai. Bab III membahas tentang keadaan pendidikan di NTB yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, jumlah sekolah, peserta didik, dan guru. Bab IV memberikan paparan tentang capaian pembangunan pendidikan yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Lampiran menyajikan tabel tentang indikator pendidikan menurut Kabupaten/Kota.

<https://ntb.bps.go.id>



METODOLOGI



<https://ntb.bps.go.id>



METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data hasil pengolahan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan BPS pada Maret 2023. Survei ini mengumpulkan data tentang pendidikan seperti partisipasi sekolah, kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan, keterangan umum anggota rumah tangga seperti jenis kelamin, usia, serta kondisi ekonomi rumah tangga terkait pengeluaran. Selain itu, beberapa data terkait dengan fasilitas pendidikan didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berasal dari Susenas dilakukan dengan melakukan pengolahan *raw data* untuk menghasilkan tabel-tabel yang dibutuhkan, sedangkan data fasilitas pendidikan yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dikutip dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka.

2.3. Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis yang dilakukan bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi ini.

2.4. Konsep dan Definisi

Agar terhindar dari salah pengertian dalam membaca dan memahami data, berikut dijelaskan konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini:

- a) **Klasifikasi desa** dibedakan menjadi dua, yaitu desa perkotaan dan desa perdesaan. Klasifikasi desa yang digunakan pada Susenas menggunakan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Kepala BPS No. 120 Tahun 2020. Adapun dasar penetapan lokasi sampel perkotaan dan perdesaan secara PPS dengan *size* banyaknya jumlah KK hasil RD SP2020.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Kelompok Pengeluaran diukur menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran per kapita sebulan sama dengan pendapatannya. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah, Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.

- d) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud di sini adalah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

- e) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- f) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

g) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD adalah seseorang yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1-A100, Paket A setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

SD/sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), SD luar biasa, Paket A, dan/atau sekolah dasar pamong.

SMP/sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMP luar biasa, dan Paket B.

SMA/sederajat meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), SMLB, MAK, dan Paket C.

SMK adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 Tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2 dan S3.

h) Partisipasi Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

$$APS_{7-12} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 13 – 15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16 – 18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APS_{19-23} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 19 – 23 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 19 – 23 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

$$APM_{SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMP Usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Murid SMA Usia 16 – 18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$APM_{PT} = \left(\frac{\text{Jumlah Mahasiswa PT Usia 19 – 23 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 19 – 23 Tahun}} \right) \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APK SD} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \right) \times 100\%$$

$$\text{APK SMA} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bersekolah di SMA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun}} \right) \times 100\%$$

- i) **APK PAUD 3-6 Tahun** adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-6 tahun.
- j) **APM PAUD 3-6 Tahun** adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-6 tahun terhadap penduduk kelompok umur 3-6 tahun.
- k) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- l) **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.
- m) **Angka Kesiapan Sekolah (AKS)** adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan prasekolah, terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.
- n) **Rasio Guru-Murid** adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.

o) **Relative Standard Error (RSE)** adalah perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. Nilai *standard error* digunakan untuk mengukur presisi suatu indikator. Nilai ini juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat. Nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan. Nilai estimasi $> 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

Tidak semua variabel hasil pendataan dihitung *standard error* dan RSE-nya. Hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung *standard error* dan RSE-nya.



KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT



<https://india.bps>



KEADAAN PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran 20 persen dari APBN, utamanya di daerah tertinggal. Pada bab ini akan dijabarkan keadaan pendidikan tahun 2023 di Provinsi NTB.

Partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. APS menitikberatkan pada partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK dan APM memberikan fokus cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan. Meskipun jenjang pendidikan formal di Indonesia dimulai dari sekolah dasar, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mendorong terwujudnya pendidikan prasekolah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023 merumuskan sasaran pembangunan pendidikan dengan target capaian tahun 2023 dan pencapaiannya pada Tabel 3.1. Semakin tinggi nilai indikator dapat diartikan bahwa pemerintah berhasil dalam menyelesaikan program pendidikan yang merata. Pada tabel 3.1 terlihat bahwa target RPJMD yang sudah tercapai hanya satu indikator yaitu APK SD/ sederajat. Indikator lain masih berada di bawah target. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun program dan kebijakan program di sektor pendidikan yang lebih efektif.

Tabel 3.1 Partisipasi Sekolah Menurut Target Tahun 2023 RPJMD dan Capaian Tahun 2023 Provinsi NTB

Indikator	Target Tahun 2023 RPJMD	Capaian Tahun 2023	Perbandingan target dan capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
APK PAUD*	83,22	43,77	(-)
APM SD/MI	99,80	98,76	(-)
APK SD/MI/SDLB/Paket A	104,00	107,07	(+)
APM SMP/MTs	98,84	84,03	(-)
APK SMP/MTs/Paket B	106,00	93,32	(-)
APM SMA/MA/SMK	95,28	68,04	(-)
APK SMA/MA/SMK/Paket C	100,00	93,23	(-)

* Anak usia 3-6 tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2019-2023

3.1. Pendidikan Anak Usia Dini

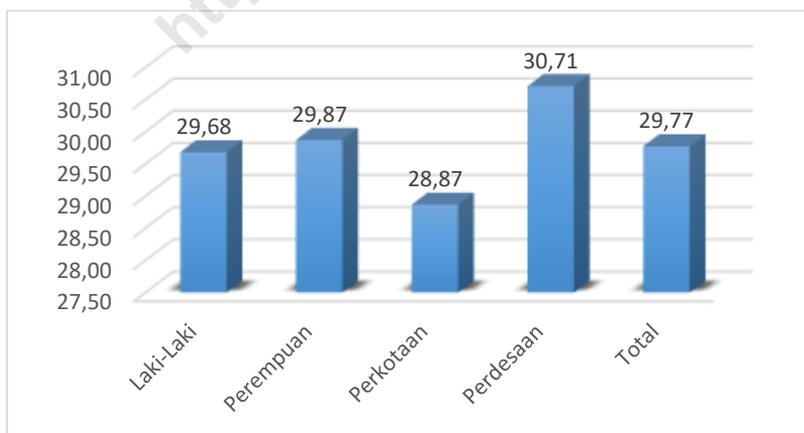
Masa perkembangan anak dimulai dari masa awal kehidupan, sejak di dalam kandungan hingga usia tiga tahun. Usia dini merupakan masa *golden age*. Dalam perkembangan otak manusia, tahap perkembangan anak usia dini menempati posisi paling penting, yakni mencapai 80 persen dari keseluruhan tahapan perkembangan otak. Anak yang mendapatkan layanan pendidikan memadai semenjak usia 0-6 tahun memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang.

Sebagai suatu komitmen dalam memaksimalkan perkembangan anak usia dini di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan antara lain berbentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) (Pemendikbud No 137 Tahun 2014). Pendidikan untuk anak usia dini bisa juga disebut sebagai pendidikan prasekolah.

Pengolahan data Susenas Maret tahun 2023, menunjukkan bahwa angka partisipasi pendidikan anak usia 0-6 tahun di Provinsi NTB mencapai 29,77 persen (dapat dilihat pada Gambar 3.1). Berdasarkan jenis kelamin, angka partisipasi anak perempuan (29,87 persen) lebih tinggi dibanding anak laki-laki (29,68 persen). Angka partisipasi untuk daerah perkotaan sebesar 28,87 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan yaitu 30,71 persen.

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa Provinsi NTB, 2023

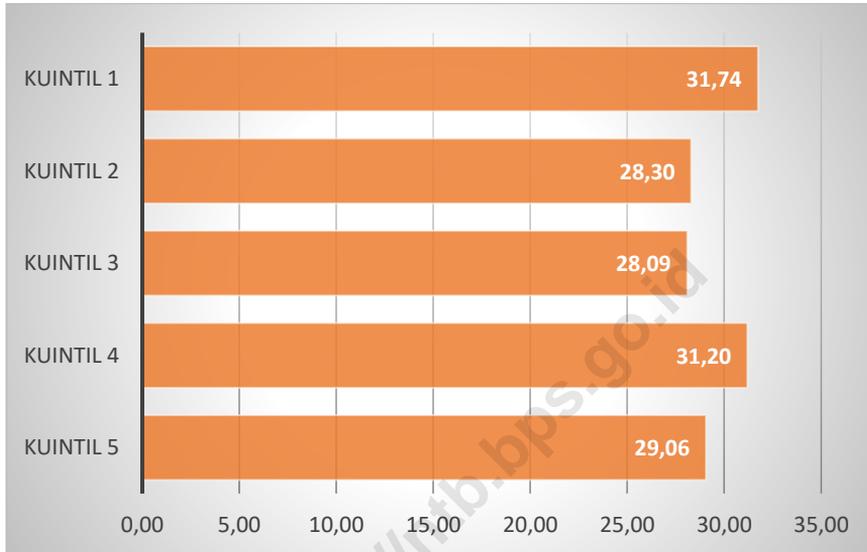


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Rumah tangga dapat dikategorikan menurut kelompok pengeluaran yang terbagi dalam lima kelompok, yaitu Kuintil 1, 2, 3, 4, dan 5. Kuintil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terbawah. Semakin tinggi kuintil

menggambarkan pengeluaran yang lebih besar, sehingga pengeluaran tertinggi berada di kuintil 5.

Gambar 3.2 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah Menurut Kelompok Pengeluaran, Provinsi NTB, 2023

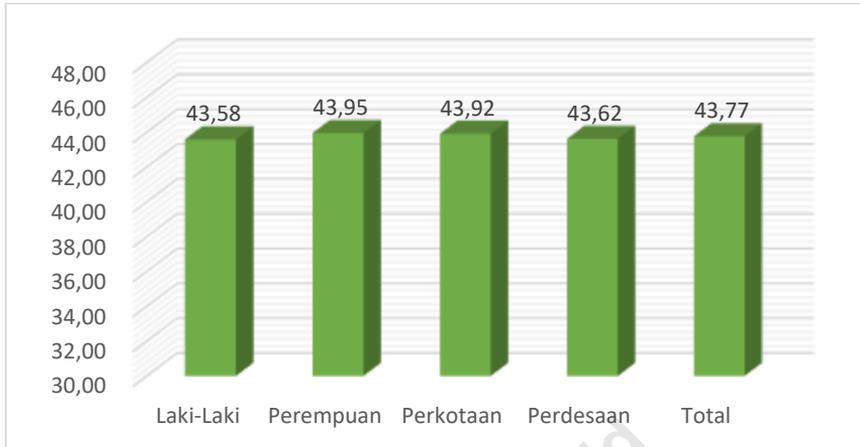


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Partisipasi pendidikan prasekolah untuk anak usia dini (0-6) tahun disajikan pada Gambar 3.2. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, partisipasi PAUD tertinggi berada pada kuintil ke-1 yaitu sebesar 31,74 persen, diikuti kuintil ke-4 kemudian kuintil ke-5 dan ke-2. Partisipasi PAUD terendah ada pada kuintil 3, yaitu sebesar 28,09 persen.

Pada Gambar 3.3 terlihat bahwa partisipasi PAUD untuk anak usia 3-6 tahun di Provinsi NTB adalah 43,77 persen. APK PAUD daerah perdesaan sebesar 43,62 persen, lebih rendah dibanding wilayah perkotaan (43,92 persen). APK PAUD anak laki-laki sebesar 43,58 persen, lebih rendah jika dibandingkan anak perempuan (43,95) persen. Anak usia dini belum bisa terlalu dipaksa mengikuti pembelajaran. Belajar sambil bermain lebih ditekankan agar anak tertarik dan bersemangat untuk mengikuti lagi kegiatan PAUD pada keesokan harinya.

Gambar 3.3 APK Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa Provinsi NTB, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. APM PAUD anak usia 3-6 tahun di Provinsi NTB Maret 2023 mencapai 43,19 persen. Di daerah perkotaan, APM PAUD 43,34 persen sedangkan di perdesaan 43,04 persen. APM PAUD anak laki-laki 42,94 persen sedangkan anak perempuan 43,45 persen.

Gambar 3.4 APM Anak Usia 3-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023

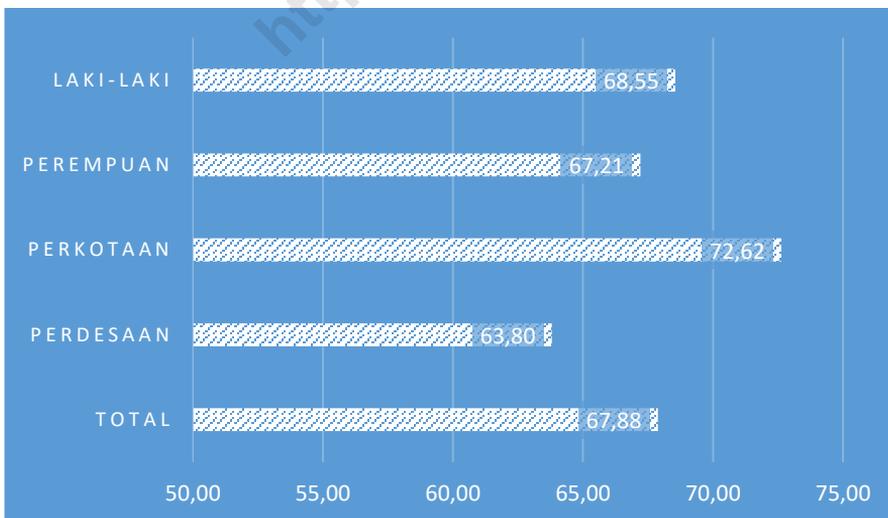


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Penyelenggaraan PAUD mempunyai tujuan diantaranya menyiapkan anak untuk siap memasuki pendidikan formal (Sekolah Dasar). Indikator yang tepat untuk mengukur kesiapan anak masuk SD adalah Angka kesiapan sekolah (AKS). AKS dihitung dengan membagi jumlah anak yang duduk di bangku kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD di tahun ajaran sebelumnya dengan jumlah seluruh siswa kelas 1 SD.

Pada tahun 2023, mayoritas anak di Provinsi NTB sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar. Pada gambar 3.5, AKS di Provinsi NTB Maret 2023 sebesar 67,88 persen, artinya 6 diantara 10 anak yang duduk di kelas 1 SD/ sederajat dinilai sudah memiliki kesiapan sekolah. Angka kesiapan sekolah di daerah perdesaan (63,80 persen) lebih rendah dibanding di perkotaan (72,62 persen). Sedangkan jika dilihat menurut gender, angka kesiapan sekolah anak perempuan (67,21 persen) lebih rendah dibandingkan anak laki-laki (68,55 persen).

Gambar 3.5 Angka Kesiapan Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa Provinsi NTB, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

3.2. Partisipasi Sekolah

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya menambah jumlah fasilitas pendidikan, meningkatkan mutu, dan melakukan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, 2023

	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	8,95	25,57	65,48
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7,30	26,30	66,40
Perempuan	10,54	24,87	64,59
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,94	25,96	66,10
Perdesaan	10,02	25,16	64,82
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	11,98	27,03	61,00
Kuintil 2	10,15	27,17	62,68
Kuintil 3	8,46	25,99	65,54
Kuintil 4	9,48	25,20	65,32
Kuintil 5	4,87	22,62	72,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2023, sebanyak 8,95 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas tidak/belum pernah bersekolah, 25,57 persen masih bersekolah, dan 65,48 persen sudah tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 9,33 persen menjadi 8,95 persen.

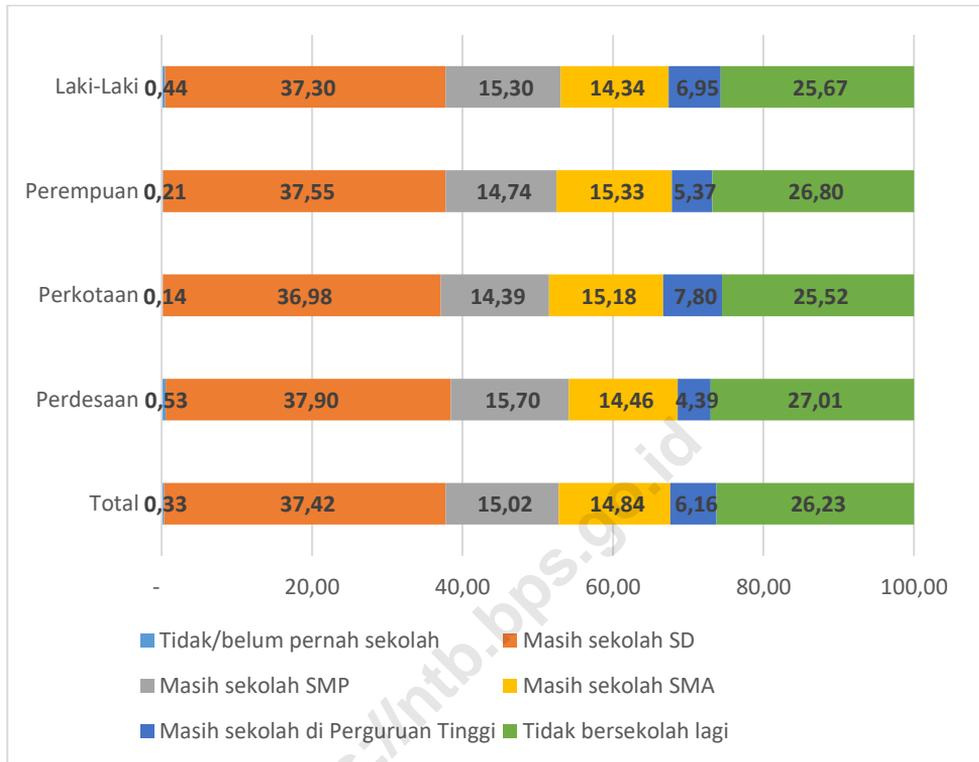
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu 10,54 persen penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, dan 7,30 persen untuk penduduk laki-laki. Sebaliknya, persentase penduduk laki-laki yang sedang bersekolah dan tidak bersekolah lagi lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Menurut Klasifikasi Desa, persentase penduduk perkotaan yang tidak/belum bersekolah lebih kecil dibandingkan penduduk perdesaan. Sedangkan persentase penduduk yang sedang bersekolah dan tidak bersekolah lagi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah perdesaan.

Keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pendidikan juga sangat berperan penting dalam memajukan bangsa. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah. Penduduk pada usia tersebut diharapkan masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah, karena generasi muda merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa.

Pada gambar 3.6 terlihat bahwa penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah hampir mendekati 0, yaitu sebesar 0,33 persen. Persentase penduduk 7-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sebanyak 73,34 persen, sementara itu persentase yang tidak bersekolah lagi sebesar 26,23 persen. Tidak ada perbedaan yang berarti dari sisi jenis kelamin maupun dari sisi Klasifikasi Desa.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah Provinsi NTB, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

3.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan menurut kelompok umur sekolah setiap jenjang pendidikan, yaitu SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), SMA (16-18 tahun), dan Perguruan Tinggi (19-23 tahun).

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur
Provinsi NTB, 2023**

	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	99,46	97,95	77,46	28,45
Jenis Kelamin				
Laki-laki	99,39	97,53	74,44	30,91
Perempuan	99,53	98,40	80,38	25,94
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,61	98,02	83,68	33,43
Perdesaan	99,31	97,89	70,79	22,22
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	99,66	97,83	72,27	15,87
Kuintil 2	98,87	97,35	72,56	30,64
Kuintil 3	99,51	97,82	81,08	25,44
Kuintil 4	99,49	97,76	79,19	30,36
Kuintil 5	99,99	99,40	82,05	38,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,46 persen atau dapat diartikan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Dilihat menurut jenis kelamin, APS perempuan umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun lebih tinggi dari APS laki-laki pada kelompok umur yang sama. Sebaliknya pada kelompok umur 19-23 tahun APS laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi daripada penduduk perempuan.

Menurut tipe Klasifikasi Desa, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, APS mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Seperti halnya APS perempuan, APS daerah perdesaan juga turun jauh pada kategori usia 16-18 tahun yaitu mencapai 70,79 persen.

APS 7-12 tahun menurut kelompok pengeluaran relatif sama untuk semua kuintil, APS terendah berada pada kuintil 2 sebesar 98,87 persen dan tertinggi 99,99 persen pada kuintil 5. APS 13-15 tahun terendah berada pada kuintil 2 sebesar 97,35 persen dan yang tertinggi berada pada kuintil 5 sebesar 99,40 persen. APS pada kategori usia 16-18 tahun, nilai terendah berada pada kuintil 1 sebesar 72,27 persen dan tertinggi berada di kuintil 5 sebesar 82,05 persen. Kemudian, APS pada kategori usia 19-23 tahun, nilai terendah berada pada kuintil 1 sebesar 15,87 persen dan tertinggi berada di kuintil 5 sebesar 38,48 persen

3.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan penduduk di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Tabel 3.4 memperlihatkan nilai APM jenjang SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum menyentuh angka 100. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023**

Jenjang Pendidikan				
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	98,76	84,03	68,04	19,07
Jenis Kelamin				
Laki-laki	98,55	84,35	65,77	22,10
Perempuan	98,97	83,69	70,24	17,80
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,52	86,40	74,45	25,10
Perdesaan	97,98	81,78	61,17	13,55
Kelompok Pengeluaran				
Kuintil 1	98,62	84,22	60,88	8,36
Kuintil 2	97,70	83,35	65,90	21,77
Kuintil 3	99,01	85,32	70,89	20,73
Kuintil 4	99,25	79,97	70,20	19,13
Kuintil 5	99,64	88,23	72,23	28,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,76 persen, APM SMP/ sederajat 84,03 persen, APM SMA/ sederajat sebesar 68,04 persen, dan APM Perguruan Tinggi 19,97 persen. Sama halnya dengan pola APS, nilai APM juga semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan masih lebih besar daripada perempuan untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMA/ sederajat. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan Perguruan Tinggi, nilai APM laki-laki lebih tinggi. Akan tetapi selisih nilai APM laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan.

Dilihat menurut tipe Klasifikasi Desa, APM wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan pada semua jenjang pendidikan. Perbedaan nilai tersebut semakin besar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perbedaan nilai terbesar terlihat pada jenjang Perguruan Tinggi yaitu 25,10 persen berbanding dengan 13,55 persen. Sedangkan menurut kelompok pengeluaran, terlihat bahwa pada jenjang SD/ sederajat nilai APM tidak berbeda jauh. Kesenjangan baru terlihat pada jenjang SMA/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Nilai APM SMA/ sederajat terendah ada pada kuintil 1 sebesar 60,88 persen dan nilai tertinggi 72,23 persen pada kuintil 5. Pada APM jenjang Perguruan Tinggi, nilai terendah ada pada kuintil 1 sebesar 8,36 persen dan tertinggi pada kuintil 5 sebesar 28,32 persen.

3.3. Jumlah Sekolah, Peserta Didik, dan Guru

3.3.1. Jumlah Sekolah

Fasilitas pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang dipergunakan dan menunjang proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Fasilitas pendidikan dalam publikasi ini dikhususkan pada jumlah sekolah.

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa jumlah sekolah mengalami peningkatan pada seluruh jenjang pendidikan. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki pertumbuhan jumlah sekolah yang paling tinggi di antara jenjang sekolah lainnya yaitu sebesar 4,66 persen. Kemudian diikuti oleh SMP di urutan kedua dengan pertumbuhan sebesar 3,74 persen, dan SMA di urutan ketiga sebesar 3,00 persen.

Tabel 3.5 Jumlah Sekolah di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun ajaran 2021/2022, dan 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Persentase Pertumbuhan Sekolah
	2021/2022	2022/2023	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	3.269	3.309	1,22
SMP	989	1.026	3,74
SMA	333	343	3,00
SMK	322	337	4,66
MI	876	886	1,14
MTs	914	921	0,77
MA	581	593	2,07

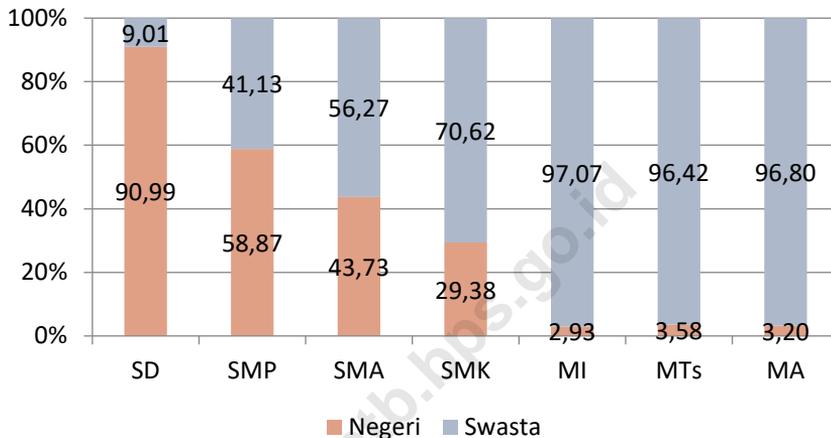
Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023

Penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak swasta berperan penting dalam memperluas akses pendidikan Indonesia bagi para pelajar di seluruh Indonesia yang belum dijangkau oleh pemerintah, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.

Gambar 3.7 memperlihatkan bahwa kontribusi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia cukup tinggi. Persentase sekolah negeri terbanyak ada pada jenjang pendidikan SD dan SMP yaitu sebesar 90,99 persen dan 58,87 persen. Berlawanan dengan itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase sekolah swasta semakin tinggi. Persentase sekolah jenjang SMA dan SMK swasta sebesar 56,27 persen dan 70,62 persen.

Selain itu, pada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta mendominasi pada semua jenjang. Persentase sekolah swasta pada MI sebesar 97,07 persen, MTs sebesar 96,42 persen, dan MA sebesar 96,80 persen.

Gambar 3.7 Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023



Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023

3.3.2. Jumlah Peserta Didik

Sejalan dengan peningkatan jumlah sekolah, jumlah peserta didik juga mengalami peningkatan. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan jenjang, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka jumlah peserta didik akan semakin menurun. Selain itu, pada Tabel 3.6 terlihat bahwa sebagian besar peserta didik lebih memilih bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta.

Sekolah negeri memang sudah sejak lama diminati daripada sekolah swasta. Peserta didik yang masuk ke sekolah swasta biasanya adalah peserta yang tidak diterima oleh sekolah negeri. Selain itu, preferensi pemilihan sekolah negeri ini juga disebabkan oleh biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena biaya di sekolah negeri lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta.

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa persentase peserta didik di sekolah negeri lebih besar dibandingkan sekolah swasta pada semua jenjang. Pada jenjang SD/MI, hal ini wajar terjadi mengingat jumlah sekolah negeri pada jenjang tersebut memang lebih banyak dibandingkan swasta. Namun, hal yang cukup menarik terlihat pada distribusi peserta didik di jenjang Pendidikan SMP ke atas. Meskipun jumlah sekolah swasta pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, maupun SMK lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, namun jumlah peserta didik menunjukkan sebaliknya. Persentase peserta didik pada SMP/MTs swasta mencapai 48,28 persen, SMA/MA sebesar 44,63 persen, dan SMK sebesar 30,32 persen. Hal ini menandakan bahwa sekolah swasta masih belum mampu mengimbangi daya tampung sekolah negeri.

Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Peserta Didik di Provinsi NTB Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik (dalam ribuan)		Persentase	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	482,97	139,59	77,58	22,42
SMP/MTs	148,15	138,30	51,72	48,28
SMA/MA	101,42	81,75	55,37	44,63
SMK	55,15	23,88	69,78	30,32

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023

3.3.3. Jumlah Guru

Guru menurut UU no. 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai peran penting dan kedudukan strategis dalam bidang pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar ditentukan oleh keberadaan guru.

Ketimpangan distribusi maupun kualitas guru akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Jumlah guru di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran 2021/2022 tercatat bahwa jumlah guru di Provinsi NTB sebesar 102 ribu orang. Terjadi kenaikan sebesar 16,13 persen pada tahun ajaran 2022/2023 sehingga jumlahnya menjadi 119 ribu orang.

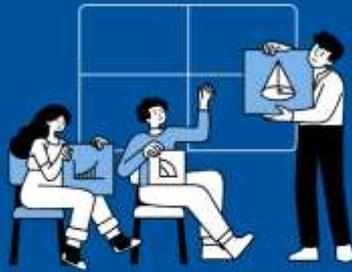
Rasio guru-murid dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah peserta didik (murid) dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-murid yang terlalu tinggi akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses pengajaran tidak efisien, karena guru mengajar sedikit siswa. Rasio guru-murid dapat bervariasi dan bergantung pada banyak faktor.

Tabel 3.7 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru (dalam ribuan)	Jumlah Murid (dalam ribuan)	Rasio Guru-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	53,63	622,56	1 : 12
SMP/MTs	37,35	286,45	1 : 8
SMA/MA	20,14	183,17	1 : 9
SMK	7,91	79,03	1 : 10

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023

Pada tabel 3.7 terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan, rasio guru-murid sudah berada di atas standar ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah murid terhadap guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya adalah 20 orang. Sedangkan pada SMK idealnya adalah satu guru bertanggung jawab terhadap 15 murid. Meskipun demikian, rasio guru-murid bukan merupakan faktor mutlak dalam keberhasilan proses belajar anak. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan.



CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



<https://ntb.bps.go.id>



CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 adalah untuk mencapai Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan. Pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar. Dengan kebijakan ini diharapkan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan dengan: (1) angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan; (2) hasil pembelajaran berkualitas; dan (3) mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi (Kemendikbud, 2020).

Dalam bab ini, indikator terkait pembangunan pendidikan yang akan dibahas antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja

dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 4.1. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi NTB, 2023

	Usia		
	15-24	15-59	15+
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,82	94,32	89,11
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,97	96,02	92,05
Perempuan	99,68	92,67	86,31
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	99,84	95,89	91,16
Perdesaan	99,80	92,63	86,92
Kelompok Pengeluaran			
Kuintil 1	99,52	92,29	83,86
Kuintil 2	99,59	92,54	87,08
Kuintil 3	100,00	93,69	88,52
Kuintil 4	100,00	95,09	90,31
Kuintil 5	100,00	97,38	94,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 15-24 tahun, AMH untuk setiap karakteristik penduduk relatif sama. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan AMH di kelompok umur tersebut tidak begitu terlihat. Sebaliknya terdapat pola yang sama untuk penduduk kelompok umur 15-59 tahun dan 15 tahun ke atas. Kelompok penduduk yang memiliki AMH lebih rendah adalah penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, penduduk berjenis kelamin perempuan, dan penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi terbawah. Selain itu, AMH pada kelompok umur 15 tahun ke atas berada di bawah 90 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur tersebut

mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa.

Mengingat bahwa prinsip utama SDGs adalah “*no one left behind*”, maka kemampuan literasi ketiga kelompok penduduk tersebut perlu menjadi fokus pemerintah. Kemampuan literasi penduduk yang meningkat akan memberikan *multiplier effect* dalam pembangunan karena berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya berdampak pula pada partisipasi penduduk dalam ketenagakerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain-lain (UNESCO, 2013).

Khusus penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas, tingkat literasi perempuan (86,31 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (92,05 persen). AMH di daerah perkotaan sebesar 91,16 persen sedangkan di perdesaan 86,92 persen. Dari kemampuan ekonomi rumah tangga, AMH kelompok ekonomi menengah ke atas lebih tinggi dibanding AMH golongan ekonomi rendah. Untuk mencapai target RPJMD, perlu digalakkan program keaksaraan terutama kepada wanita, masyarakat perdesaan, dan masyarakat golongan ekonomi rendah.

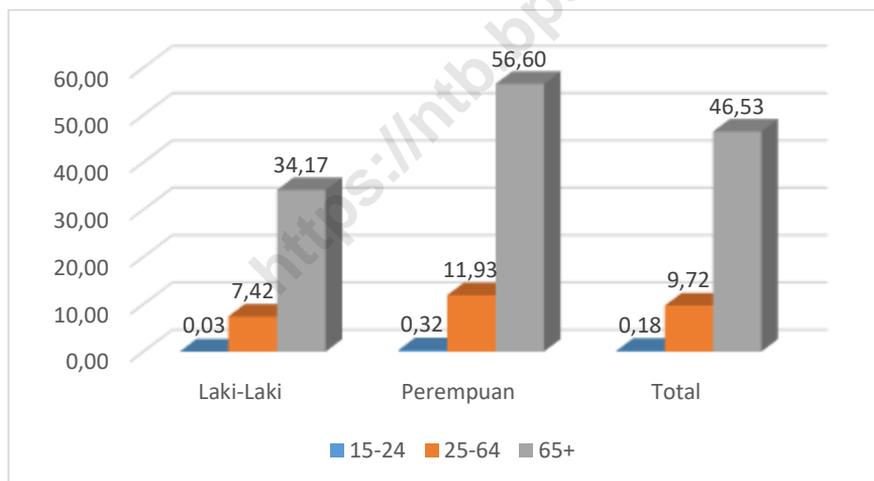
Angka melek huruf untuk kelompok remaja (15-24 tahun) hampir mencapai 100 persen, artinya hampir seluruh remaja mempunyai kemampuan literasi. Tidak ada perbedaan signifikan untuk gender, klasifikasi desa dan kelompok pengeluaran rumah tangga. Dengan tingginya angka melek huruf di kategori remaja, diharapkan mereka mampu menerima dan memahami informasi yang diterima dengan lebih baik. Diharapkan beberapa tahun ke depan, AMH di NTB akan semakin tinggi, sehingga dengan kemampuan literasi yang baik, akan mampu memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam

pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

Gambar 4.1 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di NTB tahun 2023. Secara total (laki-laki dan perempuan), sebesar 46,53 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45,96 persen. Untuk kelompok usia dewasa (25-64 tahun) terdapat 9,72 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok umur remaja hanya sebesar 0,18 persen saja yang buta aksara.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Provinsi NTB, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Dilihat dari sisi gender, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk kategori dewasa dan lansia. Meski sudah dilakukan program pengentasan, tetapi buta huruf perempuan masih tetap tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar mereka yang menjadi sasaran program pengentasan buta huruf disibukkan oleh pekerjaan atau urusan rumah tangga sehingga tidak optimal dalam mengikuti program tersebut. Jika dilihat

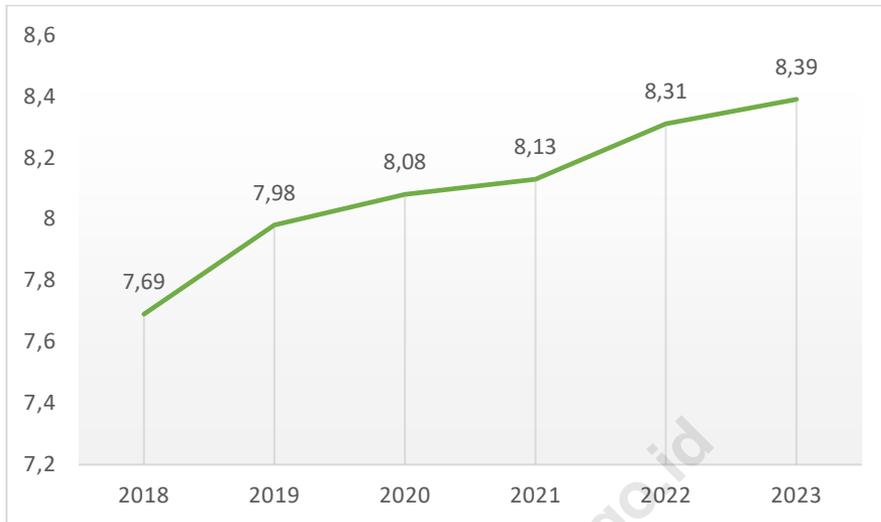
lebih rinci pada kelompok umur remaja, selisih angka buta huruf perempuan dengan laki-laki hampir tidak terlihat. Menurunnya perbedaan gender dan kecilnya angka buta huruf di usia remaja menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan dan semakin mengecilnya kesenjangan gender di masyarakat.

4.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar *United Nation Development Program* (UNDP) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Oleh karena itu, RLS menjadi salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Gambar 4.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (dalam Tahun) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB, 2018 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

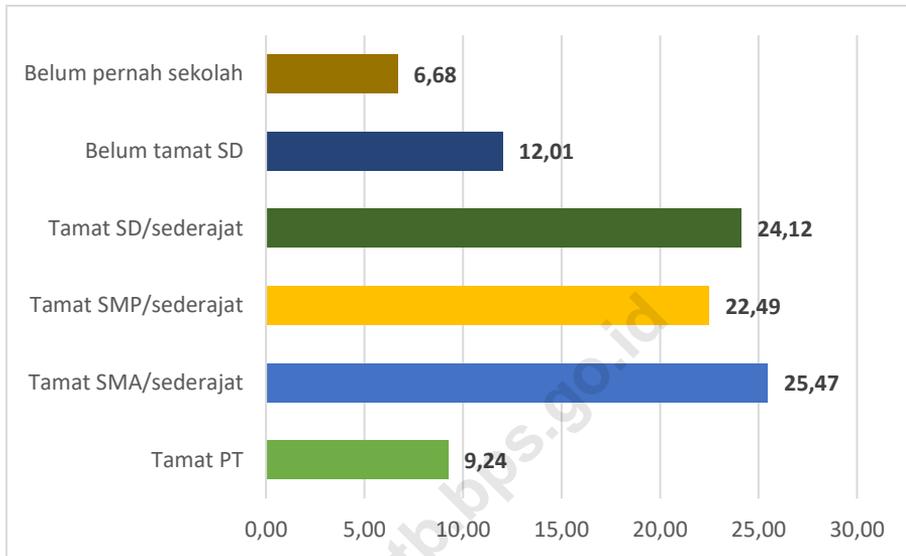
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa RLS penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2023 di NTB mencapai 8,39 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SMP (kelas VIII) atau putus sekolah di kelas 3 SMP (Kelas IX). RLS cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan angka RLS di tahun 2022-2023 tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 0,08 poin.

4.3. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, suatu negara akan dapat menghadapi tantangan perubahan zaman. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka akan semakin tinggi pula kualitas SDM yang dimiliki.

Dengan kualitas SDM yang tinggi, diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi NTB, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambaran kualitas SDM di Provinsi NTB dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas yang disajikan pada Gambar 4.3. Terdapat sebanyak 25,47 persen penduduk 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA/ sederajat, 22,49 persen lulusan SMP/ sederajat, 24,12 persen tamatan SD/ sederajat, dan hanya 9,24 persen yang lulus dari perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV/S1, S2, dan S3). Namun masih ada 18,69 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah baik karena yang belum pernah bersekolah maupun tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat. Tingginya masyarakat yang tidak mempunyai ijazah dapat disebabkan karena penduduk tua dan dewasa tidak mendapatkan akses yang baik untuk pendidikan di masa lalu.



LAMPIRAN



Tabel 1.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	99,83	99,91	99,69
Lombok Tengah	99,36	97,63	99,12
Lombok Timur	99,56	99,92	99,71
Sumbawa	99,17	98,17	99,61
Dompu	99,83	99,98	99,98
Bima	99,52	99,56	99,26
Sumbawa Barat	99,68	99,82	99,68
Lombok Utara	99,51	99,11	99,05
Kota Mataram	99,57	99,24	98,92
Kota Bima	99,17	99,98	99,79
Nusa Tenggara Barat	99,52	99,17	99,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	98,11	96,68	98,43
Lombok Tengah	98,81	97,00	97,54
Lombok Timur	99,16	97,79	97,92
Sumbawa	95,53	95,83	95,75
Dompu	99,43	98,93	98,75
Bima	98,83	98,55	98,46
Sumbawa Barat	95,27	98,10	98,80
Lombok Utara	97,20	98,89	98,99
Kota Mataram	97,83	98,78	97,42
Kota Bima	99,17	99,18	99,18
Nusa Tenggara Barat	98,34	97,74	97,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	80,68	81,17	81,23
Lombok Tengah	71,12	71,45	71,61
Lombok Timur	73,76	73,24	73,16
Sumbawa	78,01	78,32	78,33
Dompu	74,85	75,84	75,40
Bima	81,77	81,05	80,33
Sumbawa Barat	78,32	78,18	78,08
Lombok Utara	72,39	75,30	74,79
Kota Mataram	87,50	87,67	87,67
Kota Bima	85,50	85,52	84,67
Nusa Tenggara Barat	77,49	77,43	77,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	99,51	99,91	99,69
Lombok Tengah	98,55	97,01	96,99
Lombok Timur	98,14	99,92	99,71
Sumbawa	98,77	98,17	98,64
Dompu	99,46	99,98	99,74
Bima	98,75	97,76	97,53
Sumbawa Barat	99,28	99,77	99,51
Lombok Utara	99,14	97,82	98,47
Kota Mataram	99,41	99,24	98,92
Kota Bima	99,17	99,98	99,79
Nusa Tenggara Barat	98,81	98,83	98,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	85,39	87,22	87,09
Lombok Tengah	81,08	82,37	80,66
Lombok Timur	81,98	85,26	84,78
Sumbawa	83,37	86,27	77,48
Dompu	84,49	88,50	84,93
Bima	89,21	84,66	82,95
Sumbawa Barat	85,67	85,07	89,41
Lombok Utara	80,32	80,79	86,18
Kota Mataram	96,85	91,22	88,74
Kota Bima	96,83	96,90	78,46
Nusa Tenggara Barat	85,28	86,05	84,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 6.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2023

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	63,83	63,59	71,78
Lombok Tengah	60,71	59,92	63,10
Lombok Timur	67,88	67,16	66,72
Sumbawa	57,60	61,38	67,59
Dompu	69,82	74,52	66,08
Bima	77,25	75,29	64,07
Sumbawa Barat	73,55	74,34	66,70
Lombok Utara	52,99	58,47	65,45
Kota Mataram	74,99	77,44	80,95
Kota Bima	80,56	81,05	65,10
Nusa Tenggara Barat	67,09	67,61	68,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 7.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	89,87	80,75	85,26
Lombok Tengah	85,00	78,34	81,49
Lombok Timur	91,55	87,61	89,43
Sumbawa	97,53	94,58	96,12
Dompu	96,62	92,24	94,45
Bima	92,67	89,05	90,87
Sumbawa Barat	96,58	94,53	95,58
Lombok Utara	88,62	75,10	81,84
Kota Mataram	98,40	93,22	95,80
Kota Bima	98,03	94,70	96,35
Nusa Tenggara Barat	92,05	86,31	89,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 8.
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	10,13	19,25	14,74
Lombok Tengah	15,00	21,66	18,51
Lombok Timur	8,45	12,39	10,57
Sumbawa	2,47	5,42	3,88
Dompu	3,38	7,76	5,55
Bima	7,33	10,95	9,13
Sumbawa Barat	3,42	5,47	4,42
Lombok Utara	11,38	24,90	18,16
Kota Mataram	1,60	6,78	4,20
Kota Bima	1,97	5,30	3,65
Nusa Tenggara Barat	7,95	13,69	10,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 9.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	8,19	7,26	7,72
Lombok Tengah	7,81	6,99	7,37
Lombok Timur	8,19	7,60	7,87
Sumbawa	9,34	8,81	9,09
Dompu	9,81	9,05	9,43
Bima	9,49	8,80	9,15
Sumbawa Barat	9,62	8,85	9,24
Lombok Utara	8,00	6,41	7,20
Kota Mataram	10,33	9,42	9,88
Kota Bima	10,95	10,75	10,85
Nusa Tenggara Barat	8,80	7,99	8,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 10.
Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,22	37,19	17,07	10,87	6,97	27,68	100,00
LOMBOK TENGAH	0,36	40,84	14,49	13,11	6,65	24,55	100,00
LOMBOK TIMUR	0,54	40,18	15,24	15,22	6,38	22,45	100,00
SUMBAWA	0,79	36,61	13,77	12,53	7,52	28,78	100,00
DOMPU	0,23	34,33	16,43	17,77	2,44	28,80	100,00
BIMA	0,72	36,11	18,30	14,21	6,31	24,35	100,00
SUMBAWA BARAT	0,13	41,09	17,08	12,36	5,74	23,59	100,00
LOMBOK UTARA	1,02	36,31	14,62	17,28	6,72	24,05	100,00
KOTA MATARAM	0,19	29,70	12,19	17,50	11,51	28,91	100,00
KOTA BIMA	0,02	34,18	15,18	15,87	6,42	28,34	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,44	37,30	15,30	14,34	6,95	25,67	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 11.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 7-24 Tahun Menurut
Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,00	34,75	15,06	16,28	6,49	27,42	100,00
LOMBOK TENGAH	0,32	37,57	11,99	15,60	1,91	32,61	100,00
LOMBOK TIMUR	0,22	37,21	14,38	13,64	4,98	29,57	100,00
SUMBAWA	0,33	42,87	12,31	13,66	4,32	26,52	100,00
DOMPU	0,00	39,34	18,15	19,13	4,37	19,00	100,00
BIMA	0,38	40,42	18,95	15,33	3,19	21,73	100,00
SUMBAWA BARAT	0,29	46,28	14,58	12,26	3,84	22,75	100,00
LOMBOK UTARA	0,76	35,91	17,57	11,96	3,76	30,04	100,00
KOTA MATARAM	0,00	33,60	14,54	18,00	14,56	19,29	100,00
KOTA BIMA	0,07	36,18	15,73	17,96	6,12	23,92	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,21	37,55	14,74	15,33	5,37	26,80	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 12.
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak/ belum pernah sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah lagi	Total
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LOMBOK BARAT	0,11	35,97	16,06	13,58	6,73	27,55	100,00
LOMBOK TENGAH	0,34	39,17	13,22	14,38	4,24	28,66	100,00
LOMBOK TIMUR	0,37	38,65	14,80	14,41	5,66	26,10	100,00
SUMBAWA	0,57	39,53	13,09	13,06	6,03	27,73	100,00
DOMPU	0,12	36,71	17,25	18,42	3,36	24,14	100,00
BIMA	0,55	38,21	18,61	14,76	4,79	23,07	100,00
SUMBAWA BARAT	0,21	43,54	15,90	12,31	4,84	23,20	100,00
LOMBOK UTARA	0,89	36,11	16,10	14,61	5,23	27,06	100,00
KOTA MATARAM	0,10	31,60	13,33	17,75	12,99	24,24	100,00
KOTA BIMA	0,05	35,21	15,46	16,94	6,27	26,08	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	0,33	37,42	15,02	14,84	6,16	26,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 13.
Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
LOMBOK BARAT	18,55	26,84	21,94	25,58	7,08	100,00
LOMBOK TENGAH	22,31	26,01	20,31	24,64	6,73	100,00
LOMBOK TIMUR	17,59	27,77	24,23	22,01	8,40	100,00
SUMBAWA	9,52	26,06	23,95	30,81	9,66	100,00
DOMPU	12,08	14,07	28,24	31,85	13,76	100,00
BIMA	13,85	19,74	18,32	36,41	11,68	100,00
SUMBAWA BARAT	9,24	26,44	19,74	33,08	11,49	100,00
LOMBOK UTARA	20,92	25,13	23,34	23,05	7,57	100,00
KOTA MATARAM	9,09	14,73	23,63	39,26	13,29	100,00
KOTA BIMA	8,30	11,64	25,47	33,34	21,24	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	15,82	23,60	22,60	28,32	9,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 14.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditempuh, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
LOMBOK BARAT	26,79	24,65	21,61	19,89	7,06	100,00
LOMBOK TENGAH	27,15	27,42	22,37	16,72	6,35	100,00
LOMBOK TIMUR	22,26	28,46	21,43	21,34	6,51	100,00
SUMBAWA	14,17	24,28	25,15	25,21	11,19	100,00
DOMPU	15,22	19,22	28,73	25,23	11,60	100,00
BIMA	17,68	21,04	22,02	27,95	11,31	100,00
SUMBAWA BARAT	15,79	24,19	24,09	21,16	14,77	100,00
LOMBOK UTARA	32,25	26,18	21,10	15,43	5,03	100,00
KOTA MATARAM	14,71	18,82	21,31	33,76	11,40	100,00
KOTA BIMA	9,50	14,56	21,12	32,56	22,26	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	21,42	24,61	22,38	22,75	8,84	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 15.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditempuh, 2023

Kabupaten/Kota	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
LOMBOK BARAT	22,72	25,73	21,77	22,71	7,07	100,00
LOMBOK TENGAH	24,86	26,76	21,39	20,46	6,53	100,00
LOMBOK TIMUR	20,10	28,14	22,73	21,65	7,39	100,00
SUMBAWA	11,74	25,21	24,52	28,14	10,39	100,00
DOMPU	13,64	16,62	28,48	28,57	12,69	100,00
BIMA	15,76	20,38	20,16	32,20	11,50	100,00
SUMBAWA BARAT	12,46	25,34	21,87	27,23	13,10	100,00
LOMBOK UTARA	26,60	25,66	22,21	19,23	6,30	100,00
KOTA MATARAM	11,91	16,78	22,47	36,50	12,34	100,00
KOTA BIMA	8,91	13,11	23,28	32,95	21,76	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	18,69	24,12	22,49	25,47	9,24	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 16. Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan Prasekolah, 2023

Kabupaten/Kota	Masih mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)	Pernah mengikuti prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)	Pernah mengikuti prasekolah sebelum tahun ajaran 2022/2023	Tidak/ belum pernah mengikuti prasekolah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LOMBOK BARAT	25,04	0,27	3,73	70,96	100,00
LOMBOK TENGAH	23,62	1,75	3,15	71,49	100,00
LOMBOK TIMUR	22,53	0,50	3,17	73,80	100,00
SUMBAWA	31,86	0,42	4,11	63,61	100,00
DOMPU	18,52	1,20	7,92	72,36	100,00
BIMA	34,52	1,21	5,77	58,50	100,00
SUMBAWA BARAT	29,01	0,67	2,65	67,67	100,00
LOMBOK UTARA	22,27	1,67	5,84	70,22	100,00
KOTA MATARAM	19,69	0,85	2,32	77,13	100,00
KOTA BIMA	24,87	0,70	5,66	68,77	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	24,90	0,90	3,97	70,23	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 17.
Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti
Prasekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Prasekolah, 2023

Kabupaten/Kota	Taman Kanak- kanak	Bustanul Athfal/ Raudatul Athfal	PAUD terintegrasi, BKB/Taman Posyandu, PAUD-AAM, PAUD-PAK	Kelompok bermain/T aman Pentitipan Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
LOMBOK BARAT	49,33	6,24	43,54	0,89	100,00
LOMBOK TENGAH	64,27	6,46	29,27	0,00	100,00
LOMBOK TIMUR	59,07	5,36	35,57	0,00	100,00
SUMBAWA	43,57	2,51	51,93	1,99	100,00
DOMPU	43,35	0,00	55,88	0,77	100,00
BIMA	64,20	4,91	28,42	2,47	100,00
SUMBAWA BARAT	85,68	0,00	14,32	0,00	100,00
LOMBOK UTARA	61,59	1,11	37,29	0,00	100,00
KOTA MATARAM	64,53	15,01	16,63	3,83	100,00
KOTA BIMA	65,84	12,14	22,02	0,00	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	58,58	5,49	34,96	0,97	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 18.
Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Usia 7-12 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APS 7-12 Tahun				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	99,69	0,31	0,31	99,08	100,30
Lombok Tengah	99,12	0,42	0,42	98,30	99,93
Lombok Timur	99,71	0,29	0,29	99,14	100,28
Sumbawa	99,61	0,32	0,32	98,99	100,23
Dompu	99,98	0,02	0,02	99,95	100,02
Bima	99,26	0,52	0,52	98,24	100,28
Sumbawa Barat	99,68	0,32	0,33	99,04	100,31
Lombok Utara	99,05	0,93	0,94	97,22	100,89
Kota Mataram	98,92	0,80	0,81	97,35	100,49
Kota Bima	99,79	0,12	0,12	99,56	100,02
Nusa Tenggara Barat	99,46	0,15	0,15	99,17	99,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 19.
Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Usia 13-15 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APS 13-15 Tahun				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	98,43	1,10	1,12	96,26	100,60
Lombok Tengah	97,54	1,78	1,82	94,04	101,03
Lombok Timur	97,92	1,54	1,57	94,90	100,95
Sumbawa	95,75	1,96	2,05	91,90	99,61
Dompu	98,75	0,88	0,89	97,02	100,48
Bima	98,46	0,92	0,94	96,65	100,27
Sumbawa Barat	98,80	0,78	0,79	97,27	100,34
Lombok Utara	98,99	1,00	1,01	97,03	100,96
Kota Mataram	97,42	2,56	2,62	92,40	102,44
Kota Bima	99,18	0,80	0,81	97,61	100,76
Nusa Tenggara Barat	97,95	0,58	0,59	96,81	99,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 20.
Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Usia 16-18 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APS 16-18 Tahun				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	<i>Selang Kepercayaan 95%</i>	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	81,23	4,91	6,05	71,58	90,88
Lombok Tengah	71,61	5,62	7,85	60,56	82,66
Lombok Timur	73,16	4,75	6,49	63,84	82,49
Sumbawa	78,33	3,65	4,67	71,15	85,51
Dompu	75,40	5,40	7,16	64,80	86,00
Bima	80,33	4,27	5,32	71,93	88,72
Sumbawa Barat	78,08	5,32	6,81	67,64	88,52
Lombok Utara	74,79	7,11	9,51	60,82	88,77
Kota Mataram	87,67	3,68	4,20	80,43	94,90
Kota Bima	84,67	3,76	4,44	77,28	92,06
Nusa Tenggara Barat	77,46	1,84	2,38	73,85	81,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 21.
Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APM SD				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	99,69	0,31	0,31	99,08	100,30
Lombok Tengah	96,99	1,06	1,10	94,91	99,08
Lombok Timur	99,71	0,29	0,29	99,14	100,28
Sumbawa	98,64	0,75	0,76	97,17	100,11
Dompu	99,74	0,23	0,23	99,28	100,19
Bima	97,53	0,85	0,87	95,85	99,20
Sumbawa Barat	99,51	0,37	0,37	98,79	100,23
Lombok Utara	98,47	1,01	1,02	96,49	100,46
Kota Mataram	98,92	0,80	0,81	97,35	100,49
Kota Bima	99,79	0,12	0,12	99,56	100,02
Nusa Tenggara Barat	98,76	0,26	0,26	98,25	99,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 22.
Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APM SMP				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	87,09	3,11	3,58	80,98	93,21
Lombok Tengah	80,66	4,25	5,27	72,31	89,01
Lombok Timur	84,78	3,12	3,68	78,66	90,91
Sumbawa	77,48	4,16	5,37	69,31	85,64
Dompu	84,93	3,56	4,19	77,94	91,93
Bima	82,95	3,20	3,86	76,67	89,24
Sumbawa Barat	89,41	4,36	4,88	80,84	97,97
Lombok Utara	86,18	4,24	4,91	77,87	94,50
Kota Mataram	88,74	3,60	4,06	81,66	95,81
Kota Bima	78,46	4,36	5,56	69,89	87,03
Nusa Tenggara Barat	84,03	1,30	1,55	81,47	86,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 23.
Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	APM SMA				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	71,78	5,96	8,31	60,06	83,49
Lombok Tengah	63,10	5,50	8,71	52,30	73,90
Lombok Timur	66,72	4,87	7,31	57,15	76,30
Sumbawa	67,59	4,61	6,82	58,53	76,64
Dompu	66,08	5,22	7,91	55,82	76,34
Bima	64,07	5,25	8,19	53,76	74,38
Sumbawa Barat	66,70	6,71	10,06	53,52	79,87
Lombok Utara	65,45	7,18	10,97	51,34	79,56
Kota Mataram	80,95	4,35	5,38	72,40	89,50
Kota Bima	65,10	5,43	8,34	54,43	75,77
Nusa Tenggara Barat	68,04	1,96	2,88	64,19	71,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 24.
Sampling Error Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	AMH				
	<i>Estimasi</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Relative Standard Error (%)</i>	Selang Kepercayaan 95%	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	85,26	1,66	1,95	82,00	88,53
Lombok Tengah	81,49	1,30	1,59	78,95	84,03
Lombok Timur	89,43	1,12	1,25	87,23	91,64
Sumbawa	96,12	0,69	0,72	94,77	97,48
Dompu	94,45	1,03	1,10	92,42	96,48
Bima	90,87	1,16	1,27	88,59	93,14
Sumbawa Barat	95,58	1,14	1,19	93,34	97,81
Lombok Utara	81,84	1,84	2,25	78,23	85,46
Kota Mataram	95,80	0,75	0,78	94,33	97,26
Kota Bima	96,35	0,71	0,74	94,95	97,74
Nusa Tenggara Barat	89,11	0,52	0,58	88,10	90,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

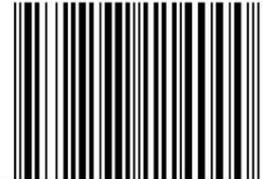
Enlighten The Nation

<https://ntb.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jl. Dr. Soedjono No. 74 Jempong Baru,
Sekarbela, Kota Mataram
Telp. (0370) 621385, Fax.(0370) 623801
Homepage: <http://ntb.bps.go.id>
Email: bps5200@bps.go.id

ISSN 2797-1147



9 772797 114000